

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad dan Juniarso, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019).

Ajisatria Suleiman, *Jaring Pengaman Digital Kesejahteraan Rakyat dan Hak Warga Negara di Era Disrupsi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).

Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018).

Angger dan Meylani, *Pengawasan terhadap Aparatur Negara*, (Media Pressindo, 2018).

Apip dan Erna, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi, 2020).

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).

Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010).

Didin Muhafidin dan Yadiman, *Dimensi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019).

- Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia, 2004).
- Effendie, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komperhensif dan Terpadu*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).
- Eny Kusdarini, *Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019).
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016).
- Josef Mario, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, (Malang: Setara Press, 2019).
- Komarudin, *Regulasi Pelayanan Publik Konsep dan Implementasinya pada Pemerintah Derah*, (Banten: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, 2020).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad Djafar & Eka Merdekawati, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

- Prijambodo, *Monitoring dan Evaluasi*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- S.F. Marbun dkk, *Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sunggono, Bambang, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Tjandra, W. R., *Hukum Keuangan Negara*, (Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006).
- Uddin B. dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

ARTIKEL JURNAL

- Adinda Margaretha, “Konsep Welfare State dalam Sistem Hukum,” *Jurnal Administrasi Negara*, 2019.

- Abdul Rokhim, “Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State),” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* XIX, no. 36 (2013): 136-168.
- Agus Suryono, "Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. VI No. 02, September 2014: 98-102.
- Alent R., “Kebijakan Pemerintah dan Pertanggungjawabannya dalam Rangka *Good Governance*,” *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 107-115.
- Abdurrahman Firdaus, “Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia,” *Jurnal Brand* 2, no. 1 (2020): 147-153.
- Asep Suryahadi, Ridho Al Izzati, dan Daniel Suryadarma, “The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft),” *SMERU Working Paper*, April 2020.
- Barry Turner, “Langkah Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Covid-19,” 2020, *Center Strategic and International Studies* Indonesia.
- E Agtha and A Novera, “Keadaan Kahir Akibat Covid-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit”, *Seminar Nasional AVoER XII*, November (2020): 188-193.
- E. ELVIANDRI, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 31 no. 2 (2019): 252-266.
- Henny Juliani, “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 329-348.

I Gusti Ayu dan Apsari Hadi, “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Tindakan Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 39 No. 1, April 2017: 33-46.

Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218-234.

Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sospol*, no. 1 (2016): 102-120.

Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-557.

Teguh Dartanto, “Kebijakan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19”, *Policy Brief UI*, 2020.

Zhiru Gao, Elsevier, “A Systematic Review of Asymptomatic Infections with COVID-19,” *Ann Oncol* 7, no. May (2020).

LAIN-LAIN

Badan Pusat Statistik, “Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha”, (Jakarta: BPS RI, 2020).

Ghoidah Rahmah, “Pertumbuhan Ekonomi, Resesi, Covid-19”, (Tempo publisher, 6 November 2020).

Komisi VI DPR RI, “Laporan Kunjungan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah (Kendal), (Februari 2021).

Safari, “Pemerintah Cairkan Banpres Produktif Rp3,6 Triliun Hingga September”, (Harian Terbit, 27 Juli 2021).

Tim Penyusun IHPS II Tahun 2020, “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020”, (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Yos Johan Utama, “Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara”, *Modul 1*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178)
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan

Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745)
13. Surat Menteri Nomor 367/SM/VII/2020 tentang pendataan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro.
14. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020

SITUS INTERNET

Alek Kurniawan, “Pelaku UMKM Perlu Cermati 3 Alternatif untuk Memperoleh Modal Usaha”, diakses pada 16 September 2021.

<https://money.kompas.com/read/2021/02/16/080300726/pelaku-umkm-perlu-cermati-3-alternatif-untuk-memperoleh-modal-usaha>.

Angga Sukmawijaya, “Anggaran Banpres UMKM Dipotong 50 Persen, Jadi Hanya RP1,2 Juta”, diakses pada 26 Oktober 2021.

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/anggaran-banpres-umkm-dipotong-50-persen-jadi-hanya-rp-1-2-juta-1vT2AHJbgbg/full>.

Angga Yuniar, “Demi Rp 2,4 Juta, Banyak Warga Tak Punya Usaha Daftar Banpres Produktif”, diakses 11 November 2021.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4392615/demi-rp-24-juta-banyak-warga-tak-punya-usaha-daftar-banpres-produktif>.

Angga Yuniar, “Inflasi 2020 Jadi yang Terendah Akibat Daya Beli Masyarakat Tertekan Pandemi”, diakses pada 27 Maret 2021.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448521/inflasi-2020-jadi-yang-terendah-akibat-daya-beli-masyarakat-tertekan-pandemi>.

BPK, “Penyaluran BPUM Rp1 Triliun Belum Sesuai Kriteria, Ini Rekomendasi BPK”, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021.

<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=27016>.

Cantika Adinda, “Lonjakan Covid Bikin Penyaluran BLT UMKM Telat”, diakses pada 26 Oktober 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20210630180618-25-257183/lonjakan-covid-bikin-penyaluran-blt-umkm-telat>.

CNN Indonesia, “Sri Mulyani Ungkap Beda Krisis 1998, 2008, dan Corona 2020”, diakses pada tanggal 28 April 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200630103623-532-518929/sri-mulyani-ungkap-beda-krisis-1998-2008-dan-corona-2020>.

Covis19.go.id, “Analisis Data Covid-19 Indonesia (Update per 27 Juni 2021)”, diakses pada 30 Oktober 2021.

<https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-27-juni-2021>.

Covid19.go.id, “Siapa Saja yang Beresiko Tinggi Terkena Covid-19?”, diakses pada 27 September 2021.

<https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/siapa-saja-yang-berisiko-tinggi-terkena-covid-19>.

Ellyvon Pranita, “Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk dari Januari”, diakses 1 Juni 2021.

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>.

Elsa Catriana, “Penyaluran BLT UMKM 2,4 Juta Sudah 100 Persen”, diakses 25 November 2021.

<https://money.kompas.com/read/2020/12/10/154359526/penyaluran-blt-umkm-rp-24-juta-sudah-100-persen>.

Faidah Umu, “Menkop: Menurut Survei Banpres Produktif Paling Dibutuhkan UMKM”, diakses 11 November 2021.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5204183/menkop-menurut-survei-banpres-produktif-paling-dibutuhkan-umkm>.

Fajar Pebrianto, “Bantuan Presiden Rp1,2 Juta Mulai Disalurkan untuk 6,6 Juta UMKM”, diakses pada 29 Oktober 2021.

<https://bisnis.tempo.co/read/1451503/bantuan-presiden-rp-12-juta-mulai-disalurkan-untuk-66-juta-umkm/full&view=ok>.

Hestika Rika, “Sri Mulyani Sebut Corona Ganggu Stabilitas keuangan RI”, diakses pada 27 September 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200511090725-532-501937/sri-mulyani-sebut-corona-ganggu-stabilitas-sistem-keuangan-ri>.

KBBI Daring, Diambil 15 September 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bantuan>.

KBBI Daring, Diambil 3 Oktober 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian>.

Kementerian Keuangan, “Walaupun dalam Kondisi Genting, Tata Kelola Tetap Harus Terjaga”, diakses 26 Oktober 2021.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/walaupun-dalam-kondisi-genting-tata-kelola-tetap-harus-terjaga/>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “5 Fakta BLT UMKM Rp2,4 Juta Sudah Cair 100%”, diakses 23 Oktober 2021 pukul 10:33.

<https://www.kemenkopukm.go.id/read/5-fakta-blb-umkm-rp2-4-juta-sudah-cair-100>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “9,1 Juta Usaha Mikro Segera Dapat Modal Gratis Rp22 Triliun”, diakses 22 Oktober 2021.

<https://www.kemenkopukm.go.id/read/9-1-juta-usaha-mikro-segera-dapat-modal-gratis-rp-22-triliun>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “BPUM Diharapkan Mampu Jadi Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19”, diakses 22 Oktober 2021.

<https://kemenkopukm.go.id/read/bpum-diharapkan-mampu-jadi-pendongkrak-pertumbuhan-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “Gaduh Banpres Produktif, Bupati Bolaang Mongondow Timur Minta Maaf ke Jokowi”, diakses 23 Oktober 2021.

<https://www.kemenkopukm.go.id/read/gaduh-banpres-produktif-bupati-bolaang-mongondow-timur-minta-maaf-ke-jokowi>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “Kemenkopukm Koordinasikan Penuntasan Penyaluran BPUM 2021 dengan Pemerintah Daerah”, diakses 23 Oktober 2021.

<https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-koordinasikan-penuntasan-penyaluran-bpum-2021-dengan-pemerintah-daerah>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “Monev Banpres Produktif untuk Usaha Mikro di D.I.Y. Secara Umum Tepat Sasaran”, diakses 19 Oktober 2021.

<https://www.kemenkopukm.go.id/read/monev-banpres-produktif-untuk-usaha-mikro-di-d-i-y-secara-umum-tepat-sasaran>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “Penerima BLT UMKM Tak Tepat Sasaran, Kemenkop Tindak Lanjuti Temuan BPK”, diakses 23 Oktober 2021.

<https://www.kemenkopukm.go.id/read/penerima-blt-umkm-tak-tepat-sasaran-kemenkop-tindak-lanjuti-temuan-bpk>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “Penjelasan Pelaksanaan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro”, diakses 25 Oktober 2021 pukul 15:00.

<https://www.kemenkopukm.go.id/read/penjelasan-pelaksanaan-penyalaran-banpres-produktif-usaha-mikro>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “Permudah Izin Usaha Kemenkopukm Targetkan 2,5 Juta Usaha Mikro Naik Kelas” diakses 22 Oktober 2021.

<https://kemenkopukm.go.id/read/permudah-izin-usaha-kemenkopukm-targetkan-2-5-juta-usaha-mikro-naik-kelas>.

Kementerian Koperasi dan UKM “Sektor UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi”, diakses pada 11 Januari 2021.

<http://www.kemenkopukm.go.id/read/sektor-umkm-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi>.

Kementerian Koperasi dan UKM, “Temui KPK, Menkop Teten Jelaskan Soal Bantuan Presiden 9,1 Juta UMKM”, diakses 21 Oktober 2021.

<https://www.kemenkopukm.go.id/read/temui-kpk-menkop-teten-jelaskan-soal-bantuan-presiden-ke-9-1-juta-umkm>.

Kumparan.com, “Banpres untuk UMKM yang (Masih) Belum Tepat Sasaran” diakses 23 Oktober 2021. [https://kumparan.com/manadobacirita/banpres-](https://kumparan.com/manadobacirita/banpres-untuk-umkm-yang-masih-belum-tepat-sasaran-1v5TlgngXag/1)

[untuk-umkm-yang-masih-belum-tepat-sasaran-1v5TlgngXag/1](https://kumparan.com/manadobacirita/banpres-untuk-umkm-yang-masih-belum-tepat-sasaran-1v5TlgngXag/1).

Liputan6.com, “Kena Recofusing, Nilai Bantuan BLT UMUM Disunat 50% Jadi Rp1,2jt”, diakses 16 November 2021.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4550512/kena-recofusing-nilai-bantuan-blt-umkm-disunat-50-persen-jadi-rp-12-juta>.

Liputan6.com, UMKM Unbankable Maupun Bankable Tetap Dibantu Pemerintah, diakses 20 Oktober 2021.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4378376/umkm-unbankable-maupun-bankable-tetap-dibantu-pemerintah>.

Lucky Maulana, “Survei BPS: 69 persen UMKM Perlu Bantuan Modal”, diakses pada 29 Agustus 2021.

<https://lokadata.id/artikel/survei-bps-daya-tahan-umkm-tinggal-3-bulan>.

M. iqbal Al Machmudi, “Survei BPS: Mayoritas Pendapatan UMKM Anjlok Akibat Pandemi”, diakses pada 11 Januari 2021.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/345099-survei-bps-mayoritas-pendapatan-umkm-anjlok-akibat-pandemi-10/29/2020>.

Nur Aida, “Indonesia Resmi Resesi, Ini yang Perlu Kita Tahu Soal Resesi dan Dampaknya”, diakses pada 25 April 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/05/125200565/indonesia-resmi-resesi-ini-yang-perlu-kita-tahu-soal-resesi-dan-dampaknya?page=all>.

Nur Fitriatus, “BLT UMKM Rp1,2 Juta Kembali Disalurkan pada 2021, Berapa Kuotanya?”, diakses pada 29 Oktober 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/02/203000265/blt-umkm-rp-1-2-juta-kembali-disalurkan-pada-2021-berapa-kuotanya-?page=all>.

Selfie Miftahul, “Potensi Penyelewengan Dana Hibah untuk UMKM yang Cair Secepat Kilat”, diakses pada 20 Oktober 2021.

<https://tirto.id/potensi-penyelewengan-dana-hibah-untuk-umkm-yang-cair-secepat-kilat-fZnm>.

Setkab.go.id, “Teten Masduki: Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro Capai 100 persen”, diakses pada 29 Oktober 2021.

<https://setkab.go.id/teten-masduki-penyaluran-banpres-produktif-usaha-mikro-capai-100-persen/>.

Sigid Kurniawan, “Stay at home, President says”, diakses pada 16 September 2021.

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/16/stay-home-president-says.html>.

Vadhia Lidyana, “9 Juta Penerima BLT UMKM Dapat Dobel, yang Belum Bagaimana?”, diakses 11 November 2021.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5516834/9-juta-penerima-blt-umkm-dapat-dobel-yang-belum-bagaimana>.

World Health Organization, diakses tanggal 26 April 2021.

<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

World Health Organization, diakses tanggal 27 Oktober 2020.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

WAWANCARA

Irene. *Hasil Wawancara Pribadi*. Asisten Deputi Pembiayaan Deputi Usaha Mikro dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dilakukan di MG Setos Hotel Semarang pada 7 September 2021.

Karni. *Hasil Wawancara Pribadi*. Penerima Banpres Produktif yang memiliki usaha keripik pisang dan tumpi di Semarang. Dilakukan di Semarang pada 16 November 2021

Tinta. *Hasil Wawancara Pribadi*. Penerima Banpres Produktif yang memiliki usaha Kerupuk Udang di Palembang. Dilakukan di Semarang pada 15 November 2021.

Fariha. *Hasil Wawancara Pribadi*. Calon Penerima Banpres Produktif pengusaha kue dari Jakarta Barat. Dilakukan di Semarang pada 15 November 2021.

Maulana. *Hasil Wawancara Pribadi*. Calon Penerima Banpres Produktif pengusaha pertanian hidroponik. Dilakukan di Semarang pada 15 November 2021.